



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.SKG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir Labata, 10 Februari 2000 (umur 20 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ██████████

██████████, disebut **Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Skg, tanggal 1 Februari 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **Saudara** kandung dari adikperempuan yang bernama:

Nama : ██████████
Tanggal lahir : 03 Agustus 2003 (umur 17 tahun 5 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : ██████████
██████████,

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : ██████████

Hal. 1 dari 11 Disp. Kawin No.115/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 17 Juli 2000 (umur 20 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Pencuci Mobil

Tempat kediaman : [REDACTED]
[REDACTED];

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksadkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan adik Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksadkannya dengan alasan bahwa adik Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N9) Nomor: B.061/KUA.21.24.12/PW.01/1/2021;
4. Bahwa adik Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksadkan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama [REDACTED] telah menerima lamaran Pemohon bernama [REDACTED] dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan adik Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

Hal. 2 dari 11 Disp. Kawin No.115/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Penolakan (N9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Nomor: B.061/KUA.21.24.12/PW.01/1/2021, tanggal 28 Januari 2021;
- b. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Adik, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/244/DINSOSP2KBP3A tanggal 01 Februari 2021;
- c. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 441/057/Pusk.Tkl tanggal 25 Januari 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Takkalalla;
- d. Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], nomor: 7313-LT-26082019-0048;
- e. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-lakibernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selain surat permohonan Pemohon juga telah melengkapi permohonannya dengan fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran saudara Pemohon, fotokopi ijazah terakhir saudara Pemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami saudara Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Disp. Kawin No.115/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan saudaranya serta calon suami dan orang tua calon suami telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan saudara Pemohon dan menunggu hingga usia saudara Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan, karena dengan menikahnya pendidikan saudaranya akan berhenti, setelah menikah saudaranya tersebut besar kemungkinan akan hamil, sedangkan organ reproduksinya belum siap, secara ekonomi, social dan psikologi saudaranya belum siap menghadapi semuanya sehingga potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Dan saudara Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya, saudara Pemohon serta calon suaminya mengetahui rencana perkawinan, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti surat berupa:

1. Asli surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo Nomor B.060/KUA.21.24.12/PW.01/1/2021, tanggal 28 Januari 2021 bermeterai cukup oleh hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sahriana Nomor 7313-LT-26082019-0048, tanggal 18 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P2;
3. Asli Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Takkalalla dengan No. 441/057/Pusk.Tkl tanggal 25 Januari 2021, bermeterai cukup oleh hakim diberi kode P3;
4. Asli surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, dengan Surat Penolakan Nomor 460/244/DINSOSP2KBP3A tanggal 01 Februari 2021, bermeterai cukup oleh hakim diberi kode P4.

Hal. 4 dari 11 Disp. Kawin No.115/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI- SAKSI :

Saksi kesatu, [REDACTED], agama Islam, [REDACTED]
[REDACTED], pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap saudara Pemohon yang bernama [REDACTED], karena saudara Pemohon mau menikah dengan [REDACTED] sedangkan umurnya baru 17 tahun lebih, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon mau mengawinkan saudaranya, karena Keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saudara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa saudara Pemohon berstatus perawan, sedang calon suaminya berstatus jejaka;

Saksi kedua, [REDACTED], agama Islam, [REDACTED]
[REDACTED], pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap saudara Pemohon yang bernama [REDACTED], karena saudara Pemohon mau menikah dengan [REDACTED] sedangkan umurnya baru 17 tahun lebih, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;
- Bahwa ada penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mau mengawinkan saudaranya, karena Keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 5 dari 11 Disp. Kawin No.115/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa saudara Pemohon berstatus perawan, sedang calon suaminya berstatus jejak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa saudara Pemohon yang baru berumur 17 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B.060/KUA.21.24.12/PW.01/1/2021, tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan dalam Permohonannya berupa fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran saudara Pemohon, fotokopi Akta Kelahiran calon suami cucuk Pemohon, dengan demikian maka sudah terpenuhi maksud Pasal 9 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan saudara Pemohon sampai batas minimal usia perkawinan, sesuai maksud Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan saudara Pemohon dan calon suaminya, bahwa mengetahui rencana perkawinan, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, dengan

Hal. 6 dari 11 Disp. Kawin No.115/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sudah terpenuhi maksud Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1 (Asli surat penolakan pernikahan dari KUA) dan bukti P2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sahriana), P3 (Asli surat keterangan dokter dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Takkalalla) dan P4 (Asli Penolakan Nikah dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak) bukti P1, bukti P2, bukti P3 dan bukti P4 tersebut adalah akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa saudara tersebut masih di bawah umur, maka baik bukti P1 sampai dengan bukti P4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, karena memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, bukan orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, saling bersesuaian satu dengan lainnya, yaitu tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon akan mengawinkan saudaranya bernama ██████████ ██████████, namun belum cukup umur, karena Keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, saudara Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 Disp. Kawin No.115/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, saudara Pemohon tersebut masih berstatus anak karena belum berusia 18 tahun, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya kalau ada hal yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi bahwa saudara Pemohon dengan dengan calon suaminya Keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 bulan dan Pemohon serta orang tua calon suaminya khawatir akan terjadi hal-hal yang bias melanggar agama dan mempermalukan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara saudara Pemohon dengan calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan saudaranya tersebut, memperoleh penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dengan surat Nomor B.060/KUA.21.24.12/PW.01/1/2021, tanggal 28 Januari 2021.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut biladitubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur: 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا لِلْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
٣٢

Hal. 8 dari 11 Disp. Kawin No.115/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah Saw haditsdari Anas RA (HR. Thabrani)

اذا تزوج العبد فقد استكمل نصفه فادبغفلت قال الله النصف الباقي

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضريرال

Artinya “Kemadharatanituharusdihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درامفاسدمقدمعلجلبالمصالح

Artinya “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemashlahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Hal. 9 dari 11 Disp. Kawin No.115/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka saudara Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa saudara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan saudara Pemohon dipandang mampu untuk menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan saudara Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada saudara Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada saudara Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED];
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Makka A., sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu

Hal. 10 dari 11 Disp. Kawin No.115/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Fitriani, S.Ag.

Drs. H. Makka A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp100.000,00
- PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp209.000,00(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Disp. Kawin No.115/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)